

Peran Agama dalam Membangun Toleransi dan Kerukunan Sosial di Tengah Keragaman Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai

***¹Sahbi Diti, ²Rifaldi Ahmad, ³Mustamin Giling**

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

email: *¹sahbyditi@gmail.com, ²rifaldiahmadkrimsus@gmail.com,

³mustamingiling@iain-ternate.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the role of religion in fostering tolerance and social harmony within the diverse community of Morotai Island Regency, North Maluku. Employing a descriptive qualitative approach, the research was conducted through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis involving religious leaders, educators, and interfaith communities. The findings reveal that religion functions not only as a system of spiritual belief but also as a social instrument that strengthens solidarity and social cohesion in a plural society. Religious practices in Morotai reflect a living form of “social religion,” where religious values are integrated with local wisdom such as *pela gandong*, deliberation, and mutual cooperation. Furthermore, education, media, and the role of religious figures are identified as key factors in reinforcing the social ecology of tolerance. The study concludes that harmony in Morotai is not accidental but a social construct rooted in inclusive religious values and sustained communal practices.

Keywords: *Social Religion, Tolerance, Social Harmony, Local Wisdom, Morotai Island*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran agama dalam membangun toleransi dan kerukunan sosial di tengah keragaman masyarakat Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap tokoh agama, pendidik, dan masyarakat lintas iman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama berfungsi tidak hanya sebagai sistem kepercayaan spiritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memperkuat solidaritas dan kohesi sosial masyarakat majemuk. Praktik keagamaan di Morotai mencerminkan bentuk “agama sosial” yang hidup, di mana nilai-nilai religius berintegrasi dengan kearifan lokal seperti tradisi *pela gandong*, musyawarah, dan gotong royong. Selain itu, pendidikan, media, dan peran tokoh agama terbukti menjadi faktor kunci dalam memperkuat ekologi sosial toleransi. Temuan ini menegaskan bahwa harmoni di Pulau Morotai bukanlah hasil kebetulan, melainkan konstruksi sosial yang berakar pada nilai-nilai keagamaan inklusif dan praktik kebersamaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Agama Sosial, Toleransi, Kerukunan Sosial, Kearifan Lokal, Pulau Morotai*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas fondasi kebinekaan. Keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya menjadi ciri utama masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, agama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga memainkan peran sosial yang signifikan dalam membentuk moralitas publik, solidaritas sosial, dan identitas kolektif masyarakat (Azra, 2021). Sejak awal kemerdekaan, nilai-nilai keagamaan menjadi dasar pembangunan bangsa, terutama dalam memperkuat prinsip toleransi dan kerukunan antarumat beragama (Latif, 2019).

Namun, dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah membawa tantangan baru bagi praktik toleransi di Indonesia. Arus informasi yang cepat sering kali memunculkan disinformasi dan polarisasi identitas keagamaan, yang berpotensi memicu konflik sosial di tingkat lokal (Haryanto, 2022). Dalam konteks ini, wilayah-wilayah multikultural seperti Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara menjadi titik penting untuk menelaah bagaimana nilai-nilai keagamaan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari antar kelompok masyarakat berbeda keyakinan.

Pulau Morotai memiliki masyarakat yang terdiri atas pemeluk Islam, Kristen, dan Katolik, yang secara historis hidup berdampingan dalam semangat gotong royong dan harmoni sosial. Namun, seperti wilayah multikultural lain, hubungan antarumat beragama di Morotai juga dipengaruhi oleh faktor politik lokal, ekonomi, serta media sosial, yang dapat menjadi pemicu gesekan sosial apabila tidak dikelola dengan baik (Sahusilawane, 2023). Dengan demikian, studi tentang agama dan keragaman masyarakat di Pulau Morotai penting untuk menjelaskan peran nilai-nilai keagamaan dalam menjaga stabilitas sosial, menganalisis pola interaksi sosial antarumat beragama, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat toleransi di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan makna yang dimaknai oleh masyarakat, bukan mengukur hubungan kuantitatif antarvariabel. Penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis bagaimana agama berperan dalam membangun toleransi dan kerukunan sosial di Kabupaten Pulau Morotai, melalui pengamatan langsung terhadap praktik sosial, interaksi antarumat beragama, serta peran tokoh agama dan lembaga pendidikan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, yang terdiri atas enam kecamatan dengan karakter masyarakat multikultural. Penelitian dilakukan selama bulan Februari hingga Juli 2025. Pemilihan waktu ini disesuaikan dengan kalender kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat agar peneliti dapat mengamati aktivitas lintas iman secara langsung.

Subjek utama penelitian ini adalah masyarakat Pulau Morotai yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan lintas agama. Target penelitian mencakup tokoh agama dari tiga komunitas besar, yaitu Islam, Kristen Protestan, dan Katolik. Tokoh adat dan masyarakat sipil yang memiliki pengaruh dalam menjaga kerukunan sosial. Guru dan pelajar dari sekolah negeri dan madrasah. Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan organisasi pemuda lintas iman.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berperan dalam menentukan fokus, memilih informan, mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis data. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yakni wawancara mendalam, dilakukan secara tatap muka dengan tokoh agama, masyarakat, dan aparat pemerintah lokal untuk memahami pengalaman sosial mereka dalam menjaga kerukunan. Observasi partisipatif, peneliti terlibat langsung dalam beberapa kegiatan lintas agama, seperti kerja bakti, peringatan hari besar, dan dialog lintas iman. Studi dokumentasi, mencakup analisis arsip pemerintah daerah, laporan FKUB, berita

media lokal, serta dokumen kebijakan tentang moderasi beragama. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Tahapan analisis mencakup: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan dengan menelusuri keterkaitan antara praktik sosial keagamaan dengan pola kerukunan masyarakat Morotai. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai kelompok, observasi lapangan, dan dokumen resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Agama dan Perannya dalam Masyarakat Majemuk Pulau Morotai

Agama dalam konteks masyarakat majemuk memiliki posisi yang sangat strategis sebagai sistem nilai dan pedoman hidup yang mengatur dua dimensi utama: hubungan vertikal manusia dengan Tuhan (*habl min Allah*) dan hubungan horizontal antar sesama manusia (*habl min al-nas*). Dua dimensi ini menjadikan agama tidak hanya berorientasi pada aspek spiritualitas pribadi, tetapi juga berperan penting dalam membangun struktur sosial dan tatanan moral masyarakat (Durkheim, 1912/2001; Azra, 2021).

Dalam perspektif sosiologi agama, fungsi utama agama adalah menciptakan kohesi sosial-yaitu rasa keterikatan dan tanggung jawab bersama di antara anggota masyarakat. Nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, dan saling menghormati menjadi “perekat sosial” (*social glue*) yang membentuk norma-norma bersama dan menumbuhkan solidaritas moral (Parsons, 1951; Berger, 1967).

Di Kabupaten Pulau Morotai, nilai-nilai ini tidak berhenti pada tataran simbolik, melainkan terealisasi dalam praktik sosial masyarakat. Contohnya adalah tradisi *pela gandong*, yaitu budaya tolong-menolong lintas agama dan etnis, serta kerja sama lintas gereja dan masjid dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa agama di Morotai berfungsi

sebagai kerangka normatif yang menuntun perilaku publik menuju kehidupan yang rukun dan saling menghormati.

Namun demikian, sejumlah penelitian kontemporer menekankan bahwa peran sosial agama bersifat dinamis dan kontekstual. Ketika dimaknai secara inklusif, agama menjadi kekuatan pemersatu; tetapi bila dimanipulasi secara politis atau eksklusif, ia berpotensi menjadi sumber polarisasi sosial (Beyer, 2020; Madjid, 2022). Dalam konteks Morotai, masyarakat cenderung mempertahankan makna inklusif agama, meskipun terdapat risiko pergeseran makna ketika kepentingan politik lokal mulai memengaruhi relasi antarumat beragama.

Dengan demikian, hakikat agama di masyarakat majemuk seperti Pulau Morotai bukan hanya sebagai ajaran teologis, tetapi juga institusi sosial yang menjaga stabilitas dan moralitas publik. Perpaduan antara nilai spiritual dan solidaritas sosial inilah yang menjadi fondasi utama dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di wilayah multikultural tersebut.

Peran Agama sebagai Instrumen Sosial dan Politik Lokal di Pulau Morotai

Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Pulau Morotai, agama memiliki fungsi yang melampaui dimensi spiritual semata. Ia berperan sebagai instrumen sosial dan politik lokal yang memengaruhi cara masyarakat berinteraksi, menyelesaikan konflik, serta membangun kesepakatan sosial. Peran strategis ini terlihat dalam kapasitas tokoh agama yang tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai mediator sosial dan fasilitator perdamaian di tengah dinamika politik dan ekonomi lokal (Nasrullah et al., 2023).

Salah satu contoh konkret adalah keberhasilan Forum Komunikasi Lintas Agama Morotai (FKLA) pada tahun 2023 dalam meredam ketegangan akibat isu pembatasan lokasi ibadah sementara di Desa Bere-Bere Kecil. Insiden tersebut memperlihatkan efektivitas pendekatan berbasis musyawarah dan dialog antarumat beragama, yang bersifat *bottom-up*, dibandingkan intervensi administratif dari pemerintah daerah atau provinsi. Temuan ini menegaskan pentingnya modal sosial keagamaan dalam mengelola konflik di tingkat akar

rumpun (Putnam, 2000; Sahusilawane, 2024). Agama dalam konteks Morotai tidak hanya menjadi sumber nilai moral, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi sosial antar kelompok berbeda identitas. Tokoh-tokoh keagamaan berperan penting dalam membangun narasi perdamaian, memperkuat kepercayaan antar komunitas, dan mencegah politisasi identitas agama. Dengan demikian, agama berfungsi sebagai mekanisme sosial integratif, bukan pemicu eksklusivitas atau perpecahan.

Sejalan dengan temuan *Ricklefs (2021)*, masyarakat kepulauan Indonesia - termasuk Morotai - cenderung memaknai agama secara praksis dan kontekstual, bukan ideologis. Artinya, agama lebih dipahami sebagai panduan etis untuk hidup bersama secara damai, bukan alat pembeda identitas atau legitimasi politik. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan saling menghormati menjadi pilar utama bagi terciptanya kerukunan sosial yang berkelanjutan.

Dengan demikian, agama di Pulau Morotai bukan hanya entitas spiritual, tetapi juga sarana rekonsiliasi sosial dan instrumen politik moral yang memperkuat kohesi masyarakat multikultural. Model relasi ini menunjukkan bagaimana integrasi nilai religius dan lokalitas dapat menjadi fondasi efektif bagi tata kelola sosial berbasis kearifan lokal.

Pendidikan, Media, dan Upaya Penguatan Toleransi di Pulau Morotai

Pendidikan dan media merupakan dua instrumen sosial yang sangat berpengaruh dalam memperkuat toleransi antarumat beragama di masyarakat multikultural seperti Pulau Morotai. Keduanya berfungsi sebagai wahana internalisasi nilai-nilai kebersamaan, penghargaan terhadap perbedaan, dan moderasi beragama yang menjadi landasan harmoni sosial. Dalam konteks pendidikan, sekolah-sekolah di Morotai, baik negeri maupun swasta, telah menerapkan kurikulum yang menekankan pada pendidikan karakter dan moderasi beragama, sebagaimana diamanatkan dalam *Kebijakan Nasional Penguatan Moderasi Beragama 2020-2024* dari Kementerian Agama RI (*Kemenag RI, 2021*). Melalui mata pelajaran agama, pendidikan Pancasila, serta kegiatan

ekstrakurikuler seperti Kelompok Belajar Lintas Iman di SMA Daruba, siswa diajak memahami perbedaan sebagai kekayaan sosial, bukan sumber konflik. Pendekatan pendidikan semacam ini memperkuat kompetensi sosial lintas iman generasi muda (Nurdin, 2023; Sahusilawane, 2024).

Selain pendidikan formal, media lokal turut berperan penting dalam membentuk opini publik mengenai relasi antarumat beragama. Berdasarkan analisis terhadap konten berita *Morotai Post* periode 2022-2024, sekitar 70% pemberitaan bernuansa keagamaan justru menonjolkan narasi positif tentang kerja sama lintas iman. Ini menunjukkan fungsi media sebagai agen kohesi sosial, yang mampu menyebarkan pesan harmoni dan solidaritas. Namun demikian, media sosial digital menghadirkan tantangan baru-karena sifatnya yang terbuka dan cepat-sering kali menjadi ruang bagi munculnya ujaran kebencian dan konflik simbolik, yang dapat merusak tatanan sosial (Wulandari, 2022; Hidayat, 2024).

Dari sisi kebijakan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pulau Morotai) memainkan peran strategis dalam memediasi isu-isu keagamaan yang berpotensi menimbulkan konflik. Program Dialog Damai Morotai 2024, yang melibatkan ulama, pendeta, dan tokoh masyarakat, merupakan praktik nyata dari kolaborasi lintas iman berbasis dialog sosial. Pendekatan ini memperkuat semangat *rahmatan lil 'alamin* dalam Islam dan prinsip kasih universal yang tertulis dalam *Injil Markus 12:31* - "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Dengan demikian, pendidikan, media, dan kebijakan lokal membentuk tiga pilar utama penguatan toleransi di Pulau Morotai. Ketiganya berfungsi secara sinergis dalam menciptakan masyarakat yang terbuka, empatik, dan berorientasi pada perdamaian. Kombinasi pendekatan kultural dan struktural inilah yang menjadikan Morotai sebagai contoh nyata dari praktik pluralisme religius yang konstruktif dan berkelanjutan.

Sintesis Analitis - Agama Sosial dan Ekologi Toleransi di Pulau Morotai

Hasil penelitian dan kajian literatur menunjukkan bahwa praktik keagamaan di Pulau Morotai merepresentasikan bentuk agama sosial yang hidup (*living religion*) - yakni ekspresi keagamaan yang tidak berhenti pada ranah teologis, melainkan bertransformasi menjadi kekuatan sosial yang adaptif terhadap konteks lokal. Agama di Morotai tidak bersifat statis, tetapi terus berinteraksi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang plural.

Dalam kerangka ini, kerukunan antarumat beragama di Morotai lahir dari sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal seperti tradisi *pela gandong*, musyawarah, dan kerja sama lintas iman. Kondisi tersebut memperkuat tesis *Hidayat (2020)* yang menegaskan bahwa kerukunan di wilayah kepulauan Indonesia bertumpu pada adat dan nilai-nilai lokal yang menyatu dengan ajaran agama. Agama di sini berfungsi sebagai sistem moral dan etika sosial yang memperkuat kohesi komunitas, bukan sebagai pembatas identitas. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi gesekan akibat perbedaan pandangan atau kepentingan politik, struktur sosial masyarakat Morotai yang terbuka dan dialogis mampu mengelola perbedaan secara konstruktif. Hal ini menunjukkan adanya kematangan sosial-religius, di mana keberagaman diposisikan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai modal sosial untuk memperkuat solidaritas dan daya tahan komunitas (Azra, 2021; Nasrullah et al., 2023).

Lebih jauh, sinergi antara pendidikan, media, dan tokoh agama menjadi faktor kunci dalam memperkuat ekologi sosial toleransi. Pendidikan berperan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama sejak dini; media lokal berfungsi menyebarkan narasi positif dan inklusif; sementara tokoh agama berperan sebagai penjaga moral publik dan mediator sosial. Kolaborasi tiga elemen ini membentuk lingkaran sosial-etik yang saling menopang, memastikan bahwa harmoni di Morotai bukan hasil spontan, melainkan produk dari rekayasa sosial dan nilai-nilai keagamaan yang hidup di ruang publik. Dengan demikian, pengalaman sosial-religius masyarakat Pulau Morotai dapat dijadikan model

mikro pengelolaan pluralitas agama di Indonesia-di mana identitas keagamaan tetap terjaga, namun tidak meniadakan komitmen terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan kebersamaan.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa agama memiliki peran fundamental dalam membentuk harmoni sosial di Kabupaten Pulau Morotai, terutama melalui praktik sosial berbasis nilai keagamaan yang hidup di masyarakat. Keberagaman agama di wilayah ini bukan sekadar fakta demografis, tetapi juga fondasi kultural yang menopang solidaritas sosial dan stabilitas komunitas. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa Agama berfungsi sebagai instrumen sosial yang adaptif, bukan hanya sebagai entitas teologis. Masyarakat Morotai menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman moral untuk memperkuat hubungan lintas iman. Kerukunan sosial di Morotai bersifat organik, lahir dari interaksi sehari-hari dan kesadaran kolektif masyarakat, bukan semata-mata hasil kebijakan formal pemerintah. Tokoh agama dan lembaga pendidikan lokal memiliki peran sentral dalam menjaga moderasi dan menanamkan toleransi lintas generasi. Media lokal dan forum lintas iman berperan ganda-dapat menjadi alat pemersatu, namun juga berpotensi menimbulkan ketegangan bila tidak dikelola secara bijak. Dengan demikian, Morotai memberikan contoh konkret tentang bagaimana pluralitas agama dapat menjadi sumber kekuatan sosial, bukan ancaman, apabila didukung oleh mekanisme sosial yang terbuka dan nilai-nilai keagamaan yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2021). *Agama dan kohesi sosial di masyarakat multikultural Indonesia*. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(2), 121-137.
- Haryanto, S. (2022). *Dinamika toleransi dan konflik sosial di era digital: Tantangan bagi masyarakat multikultural Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, 10(1), 55-72.

- Hidayat, S. (2020). *Agama, adat, dan kerukunan di kawasan kepulauan Indonesia Timur*. *Jurnal Studi Sosial dan Agama*, 14(2), 99-115.
- Hidayat, Z. (2024). *Media sosial dan ujaran kebencian: Ancaman terhadap kohesi sosial di Indonesia*. *Jurnal Komunikasi dan Budaya Digital*, 8(1), 33-49.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Kebijakan Nasional Penguatan Moderasi Beragama 2020-2024*. Jakarta: Kemenag RI.
- Latif, Y. (2019). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualisasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Madjid, N. (2022). *Agama dan ruang publik: Tantangan keberagaman inklusif di era modern*. *Jurnal Filsafat dan Keagamaan Nusantara*, 12(3), 177-192.
- Nasrullah, A., Fadli, M., & Karim, S. (2023). *Agama dan modal sosial lokal dalam resolusi konflik di Indonesia Timur*. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(3), 201-220.
- Nurdin, R. (2023). *Pendidikan multikultural dan penguatan karakter toleransi di sekolah menengah*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(1), 45-62.
- Sahusilawane, H. (2024). *Kearifan lokal dan dialog antarumat di Pulau Morotai*. *Jurnal Harmoni Sosial*, 10(1), 45-62.
- Wulandari, E. (2022). *Peran media lokal dalam membangun opini publik tentang kerukunan antarumat beragama*. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, 9(2), 80-98.
- Yusuf, M., & Latuconsina, F. (2024). *Agama dan identitas sosial di Maluku Utara: Studi kasus Morotai*. *Jurnal Ilmu Sosial Kontemporer*, 12(2), 89-108.